

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional merupakan ilmu yang mempelajari segala aspek, perilaku, sistem, proses dan fenomena yang bersifat internasional. Hubungan Internasional ialah hubungan yang sangat pelik karena didalamnya terlibat Negara-negara yang berdaulat, maka hubungan ini dikatakan lebih rumit mekanismenya dari hubungan antar manusia di dalam suatu Negara, Hubungan Internasional menjadi sangat rumit manakala dihubungkan dengan berbagai macam sudut pandang yang korelasinya tidak mudah. Sejalan dengan tujuan dari Hubungan Internasional itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari perilaku para aktor Internasional baik itu Negara maupun non-negara. Dalam Hubungan Internasional aktor yang dianggap paling penting adalah Negara maka dari itu pergerakan suatu Negara mendapat perhatian lebih di dunia Internasional. Namun interaksi non-negara pun menjadi penting, karena tidak semua interaksi Internasional melibatkan Negara, tetapi aktor non-negara pun akan terlibat. (Darmayadi, 2015:22).

Dalam perkembangannya, Ilmu Hubungan Internasional adalah ilmu yang bersifat interdisipliner, artinya Hubungan Internasional tidak bisa dipisahkan dari ilmu sosial lainnya yang saling berhubungan satu sama lain. Apabila mengikuti

perkembangan dan sejarahnya, Ilmu Hubungan Internasional pada awalnya bertujuan untuk mencegah perang dan menjaga perdamaian. (Darmayadi, 2015:12).

Runtuhnya Uni Soviet pada 1990 memunculkan warna baru terhadap perkembangan Hubungan Internasional, berakhirnya perang dingin meredakan persaingan dua kekuatan besar yang bercorak militer antara blok barat – blok timur, mengganti sistem bipolar menjadi multipolar. Bentuk persaingan yang semula dalam bidang ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet cenderung berfokus pada isu-isu keamanan (*high politics*) pasca perang dingin berganti fokus menjadi lebih condong pada isu-isu ekonomi, hak asasi manusia, terorisme maupun lingkungan (*low politics*) (Perwita & Yani, 2017:5).

Hubungan Internasional Kontemporer adalah sebuah interaksi yang melibatkan fenomena sosial terkait ideologi, politik, hukum, sosial, budaya, hankam dan ekonomi antara para actor internasional baik dalam ranah pemerintah ataupun non-pemerintah. Hubungan Internasional Kontemporer tidak hanya membahas mengenai politik namun subjek lainnya yang memiliki interdependensi seperti ekonomi, hak asasi manusia, keamanan, isu lingkungan, organisasi internasional, kesenjangan dan ketimpangan. (Perwita&Yani, 2017:8)

Dinamika Hubungan Internasional menunjukkan perubahan yang mencolok selama satu dasawarsa terakhir dengan perubahan dalam substansinya dari waktu ke waktu. Munculnya masalah-masalah baru telah merubah wajah dunia seperti muncul konflik etnis, terorisme internasional, globalisasi dan isu-isu

lokal yang mendunia yang mana isu-isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi dalam hubungan internasional. (Perwita&Yani, 2017:10).

Dalam menjelaskan Hubungan Internasional Shawn C. Smallman dan Kimberley Brown menyatakan bahwa kajian hubungan internasional lebih tepat jika dikatakan *global studies*, karena yang dipelajari di studi Hubungan Internasional berokus pada globalisasi, perubahan dan dampaknya pada kemanusiaan, juga kajian Hubungan Internasional tak luput dari permasalahan gender, ras, kelas dan permasalahan internasional lainnya. Sepanjang isu tersebut berdampak pada masalah kemanusiaan lintas batas Negara maka studi Hubungan Internasional yang dikenal selama ini merupakan bagian dari kajian global studi (Bakri, 2017:7).

Hal ini menjelaskan bahwa hubungan internasional mencakup seluruh bentuk interaksi. Interaksi tersebut dapat berupa persaingan, konflik, perang maupun kerja sama. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerja sama yang dilakukan oleh negara didasari oleh kebutuhan atau kepentingan nasional negara tersebut. Kerja sama dapat dijadikan sebagai upaya sebuah negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya (<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2021/1360>).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional adalah salah satu konsep yang penting dalam Hubungan Internasional, konsep ini menjelaskan tentang perilaku luar negeri suatu Negara. Menurut para aktor realis, kepentingan nasional adalah cerminan kekuatan suatu Negara, yang mana kekuatan suatu Negara adalah

sesuatu yang dapat mengontrol satu Negara terhadap Negara lain dan harus selalu dikembangkan serta dipelihara. Tujuan dari kepentingan Nasional adalah upaya suatu Negara untuk bertahan dalam kancah perpolitikan internasional (Perwita&Yani, 2017: 35).

Semua Negara memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai, melalui kepentingan nasional tujuan fundamental suatu Negara dirumuskan demi merumuskan kebijakan luar negerinya. Unsur pembentukan kepentingan nasional adalah hal-hal vital suatu Negara seperti keamanan, pertahanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita&Yani, 2017: 35).

Dalam kepentingan nasional, peran Negara sebagai pengambil keputusan dan sebagai pemain penting dalam interaksi Hubungan Internasional memiliki pengaruh terhadap masyarakat di dalam negerinya. Karena bagaimanapun, kepentingan nasional yang dirumuskan suatu Negara akan berpengaruh pada kesejahteraan dan kestabilan rakyatnya. Menurut Thomas Hobbes, Negara merupakan pemberi perlindungan kepada rakyatnya karena Negara merupakan unsur yang penting dalam kehidupan rakyat, tanpa adanya peran Negara dalam menjamin kondisi ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, kehidupan bermasyarakat akan sangat terbatas. (Jackson, 2009:89).

Secara konseptual kepentingan nasional berfungsi sebagai cerminan pergerakan politik luar negeri suatu Negara. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional:

“...Hubungan antara tiap Negara tercipta karena adanya kelebihan dan kekurangan dalam produksi, keunggulan komparati (*Comparative advantage*) membuka peluang untuk Negara memenuhi kepentingan nasionalnya...”

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa masing-masing Negara memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Negara lain, perbedaan budaya, gaya hidup, demografi dan faktor historis menjadi penentu perbedaan satu negara dengan Negara lainnya. Disisi lain, Negara pun tak luput dari kekurangan. Inilah yang mendorong Negara untuk bekerja sama dengan Negara lain baik dengan kerjasama bilateral atau multilateral demi memenuhi kepentingan nasionalnya (Rahim, 2:2014).

Teuku May Rudy menyatakan opininya, bahwa:

“Kepentingan Nasional seringkali dijadikan ukuran para pembuat keputusan pada interaksinya dengan Negara lain sebelum mengambil dan perumuskan serta menentukan sikap serta kebijakan. Bahwa, setiap langkah kebijakan luar negeri harus berdasarkan kepentingan nasional dan harus melindungi semua hal yang terkategori sebagai kepentingan nasional” (Rudy, 2002:116).

Kepentingan nasional dimaksud untuk mengarahkan para penentu keputusan suatu Negara dalam pembuatan keputusan eksternal Negara. Kebijakan luar negeri mencakup strategi, cita-cita, arahan, metode dan lain sebagainya, dengan itu Negara melakukan interaksi dengan Negara dan aktor non Negara lainnya. (Jackson & Soerensen, 2014:439)

2.1.3 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah strategi yang dibuat oleh para perumus kebijakan untuk menghadapi Negara lain sebagai bagian dari politik

internasionalnya dan dirumuskan untuk mencapai tujuan nasional yang tertulis dalam kepentingan nasional suatu Negara, dalam kaitannya, kebijakan luar negeri dibuat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan rakyat walaupun rakyat tak terlibat dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang hanya ditentukan oleh pemerintahan yang sedang berkuasa, untuk pemenuhan kepentingan nasional Negara akan melakukan berbagai cara seperti menjalankan kerjasama bilateral, trilateral, regional serta multilateral, (Perwita&Yani, 2017:49).

Menurut Rosenau, Kebijakan Luar Negeri adalah Upaya Negara dengan segala perilaku dan sikap yang telah dilakukan demi mencapai keuntungan dari lingkungan eksternalnya, menurutnya kebijakan luar negeri akan terus ada sebagai upaya mempertahankan kesinambungan suatu Negara, menurut Rosenau apabila kita melihat lebih dalam terhadap kebijakan luar negeri maka kita akan menemukan suatu hal yang kompleks dan luas mencakup kebutuhan internal serta eksternal termasuk didalamnya kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktiitas rutin untuk memelihara identitas suatu bangsa. (Perwita&Yani. 2017:49).

Langka-langkah dalam pembuatan kebijakan luar negeri diantaranya:

1. Memaparkan rumusan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan nasional dengan mempertimbangkan tujuan yang jelas serta terfokus.
2. Menetapkan faktor situasional dilingkungan dalam negeri dan luar negeri yang berubungan dengan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisa kemampuan nasional untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Melakukan tindakan yang dibutuhkan.
5. Secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan. (Perwita&Yani, 2017:50).

Dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdapat 3 tipe keputusan yaitu keputusan mikro, keputusan makro dan keputusan krisis yang pengambilan keputusannya ditentukan oleh beberapa faktor dibawah ini:

1. Struktur sistem internasional.
2. Kebutuhan sosial dan ekonomi serta adanya sifat domestik.
3. Keadaan dimana perumus kebijakan menilai kondisi eksternal mengancam nilai kepentingan nasional.
4. Letak, kondisi dan lingkungan geografis serta ketersediaan sumber daya alam (Rudy, 2002:28).

2.1.3.1 Tujuan dan Fungsi Kebijakan Luar Negeri

Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan menjadi 3 tujuan yaitu kebijakan jangka pendek menengah dan jangka panjang, kebijakan jangka panjang dalam politik internasional dimaksudkan untuk mencapai perdamaian, keamanan serta kekuasaan (Perwita&Yani, 2011:51).

Tiga tujuan dalam kepentingan luar negeri :

1. Tujuan Kepentingan dan nilai inti

Tujuan kepentingan dan nilai inti ini adalah sesuatu yang semua orang akan melakukan apapun untuk mencapainya, begitu pula dengan Negara,

Tujuan kepentingan dan nilai inti tertuang pada asas-asas pokok kebijakan luar negeri yang diterima dengan mudah oleh masyarakat. Tujuan dalam kepentingan ini bersifat jangka pendek, definisi dari nilai kepentingan dan nilai inti tergantung pada pembuat keputusan.

2. Tujuan Jangka Menengah

Jangka menengah memiliki beberapa tujuan, yang pertama adalah kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi, namun tak semua Negara dapat memenuhi kebutuhan tersebut sendiri, maka Negara akan memulai interaksinya dengan Negara lain demi memenuhi kepentingan nasionalnya dengan cara kerjasama, bantuan luar negeri, perdagangan dan akses informasi. Yang kedua meningkatkan prestise Negara, dewasa ini prestise suatu Negara diukur dengan perkembangan industri dan teknologi, Negara berkembang mulai merangkak maju dengan harapan dapat mengejar ekonomi Negara berkembang dan Negara maju memperlihatkan presitisenya dengan kebijakan luar negeri, kekuatan militer, bantuan luar negeri, jalur diplomatik serta kunjung-mengunjungi suatu Negara. Yang ketiga adalah tujuan memperluas wilayahnya, terlepas apakah wilayah itu penting atau tidak untuk kepentingan ekonomi, sosial dan strateginya.

3. Tujuan Jangka Panjang

Tujuan jangka panjang adalah visi dan pandangan mengenai ideologi sistem internasional. Perbedaan tujuan jangka panjang dan jangka menengah tidak hanya soal waktu namun lebih dari itu tujuan jangka

panjang memiliki lingkup yang berbeda. Negara biasanya melakukan tekanan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang (Setiawan&Sulastri, 2017:13)

Secara umum kebijakan luar negeri melindungi aspek-aspek penting dalam suatu Negara, Fungsi umum kebijakan luar negeri diantaranya:

1. Melindungi keamanan nasional.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kestabilan ekonomi.
3. Membina daerah strategis dan penting melalui pembangunan bilateral dan multilateral.
4. Memajukan martabat manusia melalui peningkatan Hak Asasi Manusia.

(Setiawan&Sulastri, 2017:14)

2.1.3.2 Konsepsi Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan yang dirumuskan suatu Negara dipengaruhi oleh beberapa hal, baik berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri itu sendiri. Kebijakan luar negeri mempunyai 3 konsepsi untuk menjelaskan hubungan satu Negara dengan Negara lain (Perwita&Yani, 2011:53).

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*).

Politik luar negeri sebagai pedoman untuk para pembuat keputusan demi menghadapi kondisi eksternal yang menuntut perumusan kebijakan luar

negeri berdasarkan orientasi yang mencakup sikap persepsi dan nilai sejarah serta letak strategis Negara di kanca internasional.

2. Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan or action*).

Kebijakan luar negeri dalam hal ini merupakan komitmen para perumus kebijakan untuk menjadikan situasi lingkungan eksternal yang stabil dengan kebijakan luar negeri. Rancangan dari tindakan ini harus spesifik dan alat untuk mencapai tujuan ini harus memadai, kebijakan luar negeri dalam fase ini sulit untuk diamati karena lebih banyak disampaikan pada konferensi pers atau dalam komunikasi diplomatik.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*).

Kebijakan ini berada pada tingkat empiris yaitu langkah-langkah yang nyata yang berkorelasi dengan keadaan eksternal. Langkah-langkah tersebut dikembangkan berdasarkan orientasi umum dan dikembangkan oleh komitmen serta sasaran yang lebih jelas (Perwita&Yani, 2011:53-55)

2.1.3.3 Sumber-Sumber Kebijakan Luar Negeri

Dalam buku *World Politics: An Introduction*, James N. Rosenau membagi sumber-sumber kebijakan luar negeri menjadi 4 kategori, diantara:

1. Sumber sistematis (*systemic sources*)

Sumber ini menjelaskan hubungan suatu Negara besar dengan lingkungan eksternalnya, serta pola-pola aliansi terhadap isu wilayah dan krisis. Yang dimaksud Negara besar diukur dengan seberapa jauh keterlibatannya dan kapabilitasnya dalam struktur hubungan internasional.

2. Sumber Masyarakat (*Societal Sources*)

Sumber masyarakat adalah sumber yang berasal dari internal Negara, sumber ini mencakup faktor sejarah, hierarki sosial, kebudayaan, pembangunan ekonomi dan pendapat public. Kebudayaan dan sejarah meliputi nilai, norma, tradisi dan hal yang terjadi di masa lampau. Pembangunan ekonomi meliputi kapabilitas suatu Negara demi mencapai tujuannya yang mendasari terciptanya hubungan dengan Negara lain. Struktur sosial meliputi SDM yang dimiliki suatu Negara dan seberapa tinggi tingkat keharmonisan suatu Negara. Tanggapan dari masyarakat pun menjadi indikator perubahan sentimen masyarakat pada dunia luar.

3. Sumber Pemerintah (*Governmental sources*)

Merupakan sumber yang berasal dari internal sebagai pertanggung jawaban politik dan struktur pemerintahan seperti pemilu, persaingan antar partai politik dan kesiapan para perumus kebijakan untuk menghadapi kondisi eksternal.

4. Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*)

Sumber yang berasal dari internal Negara, sumber idiosinkratik melihat nilai, bakat serta kepribadian para elit politik yang dapat mempengaruhi

persepsi mereka terhadap kebijakan luar negeri (Perwita&Yani, 2011:57-58).

2.1.4 Organisasi Internasional

Dalam Hubungan Internasional tak dapat dipungkiri bahwa Organisasi Internasional menjadi aktor terpenting setelah Negara, dalam literatur, Organisasi Internasional memiliki beberapa nama yang dalam harfiahnya disamaratakan dengan konsep masyarakat internasional, institusi internasional dan organisasi internasional. (Darmayadi, 2015:77)

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organization* berpendapat bahwa:

“Organisasi Internasional berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional. Pertama, kata Internasional diartikan sebagai hubungan antar wakil dari sebuah Negara yang berdaulat (*interstate*). kedua, aktivitas individu atau kelompok dalam hubungan *intergovernmental* dengan nama lain Hubungan Transnasional. Ketiga, Hubungan antara satu cabang pemerintahan suatu Negara contohnya kementerian pertahanan yang bekerjasama dengan badan intelijen suatu Negara, hubungan tersebut tak melalui kebijakan luar negeri. Ketiga hubungan tersebut termasuk Hubungan Internasional” (Perwita&Yani, 2017:92).

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang berkesinambungan yang dirumuskan oleh kesepakatan anggota, baik Negara maupun non Negara dari dua atau lebih pemerintahan berdaulat demi mencapai tujuan bersama bagi para anggota, untuk mendalami definisi Organisasi Internasional harus ditelaah tujuan yang ingin dicapai dan aktivitasnya dalam dunia internasional. Organisasi Internasional tidak dibentuk untuk saling

memerangi anggota dalam arti luas Organisasi Internasional merupakan sesuatu yang mengikat yang melampaui batas Negara dimana ikatan tersebut berasal dari perjanjian yang telah disepakati (Perwita&Yani, 2017:93).

Piere Gerbet mengatakan bahwa ide sebuah organisasi internasional berasal dari upaya membawa ikatan atau janji dalam organisasi ke dalam Hubungan Internasional yang bersifat tanpa batas dengan harapan mencapai harapan bersama, institusi ini menghendaki para anggotanya untuk menyatakan pendapat juga melaksanakan tugas dan kepentingan internasionalnya (Darmayadi, 2015:80-81).

2.1.4.1 Pendekatan dalam Organisasi Internasional

Secara umum di dalam Organisasi Internasional terdapat beberapa pendekatan, diantaranya:

1. Historical Approach

Pendekatan yang mempelajari suatu organisasi berdasarkan sejarah perkembangannya dan proses terbentuknya suatu Organisasi Internasional, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah akan diketatahui kaitan antara masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang.

2. Legal Norm

Metode yang melakukan pendekatan terhadap organisasi dengan melihat landasan hukum yang menjadi fondasi pembentukannya, baik itu dibentuk berdasarkan perjanjian (*treaty*), kesepakatan (*agreement*), fakta(*pact*),

deklarasi (*declaration*) lalu akan diketahui sistematika operasinal organisasi dan kewajiban para anggota.

3. *Structural-functional Approach*

Metode pendekatan yang mengartikan fungsional sebagai “what must be done” sehingga fokusnya pada hal-hal formal (aspek hukum organisasi) dan aspek informal (cara-cara politis) sedangkan struktur diartikan sebagai pola untuk mencapai tujuan organisasi.

4. *Decision-Making Analysis*

Metode yang menganalisa Organisasi Internasional berdasarkan proses pengambilan keputusan dan menganalisa organisasinya. Keunikan dari pendekatan ini adalah bahwa setiap anggota organisasi mempunyai organ politik sendiri namun dituntut untuk menyesuaikan dengan statute atau piagam organisasi.

5. *Comparative Approach*

Pendekatan yang meneliti suatu organisasi dengan cara membandingkan satu organisasi dengan organisasi lainnya melalui perbandingan yang relevan dengan unsur yang dimiliki oleh kedua organisasi, misalnya latar belakang pendirian, anggota, isu organisasi dan lainnya (Darmayadi, 2015:81-83)

2.1.4.2 Klasifikasi Organisasi Internasional

Elemen yang menjadi ciri suatu Organisasi Internasional dapat dilihat dari: keanggotaan organisasi (*membersip*), tujuan organisasi (*aim*), dan struktur (*structure*) organisasi tersebut. Dalam hal keanggotaan ada organisasi yang

anggotanya antara Negara (*interstate*) atau antar pemerintahan (*intergovernmental*) ada juga yang *non governmental*. (Triwahyuni&Darmayadi, 2015:83).

Menurut Anthony Judge ada 8 kriteria dari organisasi Internasional:

1. Tujuan organisasi harus bersifat internasional dengan setidaknya terdapat tiga anggota.
2. Keanggotaan harus individual atau kolektif dan memiliki hak suara penuh, sekurang-kurangnya tiga perwakilan dari Negara berbeda.
3. Undang-undang organisasi wajib berisikan struktur formal yang mengatur hak anggota untuk memilih pengurus organisasi secara berkala.
4. Petugas organisasi tidak boleh berasal dari Negara yang sama lebih dari satu periode.
5. Setidaknya ada tiga Negara penyumbang dana untuk organisasi dan tidak berorientasi mencari keuntungan.
6. Organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan organisasi lainnya harus memiliki struktur organisasi, mandiri dan berjalan sendiri.
7. Bukti-bukti kegiatan organisasi harus tersedia.
8. Kriteria seperti ukuran, politik, ideologi, wilayah aktifitas, alokasi geografis bukan menjadi ukuran organisasi tersebut bersifat internasional atau bukan (Darmayadi, 2015:83-84).

Teuku May Rudi lebih memperinci penggolongan organisasi internasional berdasarkan segi tinjauannya, ada delapan hal, yaitu:

1. Kegiatan organisasi: organisasi internasional antarpemerintah (*IGO/International Government Organization*) dan organisasi internasional nonpemerintah (*INGO/International nongovernmental Organization*).
2. Ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan: Organisasi internasional global dan organisasi internasional regional.
3. Bidang kegiatan (operasional) organisasi, seperti ekonomi, lingkungan hidup, pertambangan, perdagangan internasional dan seterusnya.
4. Tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi: organisasi internasional umum dan organisasi internasional khusus.
5. Ruang lingkup (wilayah) dan bidang kegiatan: global-umum, global-khusus, regional-umum, regional-khusus.
6. Menurut taraf kewenangan (kekuasaan): organisasi supranasional (*supranational organization*) dan organisasi kerjasama (*co-operative organization*).
7. Bentuk dan pola kerjasama: kerjasama pertahanan-keamanan (*collective security*) yang biasanya disebut "*institutionalized Alliance*" dan kerjasama fungsional (*functional organization*).
8. Fungsi organisasi: (a) organisasi politik: yaitu organisasi yang didalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam Hubungan Internasional. (b) organisasi administratif yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melaksanakan kegiatan teknis secara administratif dan (c) organisasi peradilan (*judicial organization*): yaitu organisasi yang

menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) menurut prosedur hukum dan melalui proses peradilan (sesuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian internasional) (Darmayadi, 2015:85-86).

2.1.4.3 Penggolongan Organisasi Internasional

Ada dua kategori utama dalam penggolongan organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi yang beranggotakan pemerintah antar Negara (inter-Governmental organization/IGO), anggotanya terdiri dari perwakilan resmi suatu Negara.
2. Organisasi yang anggotanya berasal dari non-pemerintah (Non-governmental organization), terdiri dari kelompok-kelompok swasta dibidang keilmuan, kebudayaan, ekonomi dan sebagainya (Perwita&Yani, 2017: 93-94)

Coulombis dan Wolfe menggolongkan organisasi internasional berdasar pada penggabungan antara keanggotaan dan tujuan, yang mana terdapat 4 kategori IGO diantaranya:

1. Global Membership and general purpose

Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan maksud serta tujuan organisasi bersifat umum. Contoh: PBB

2. Global Membership and limited purpose organization

Organisasi antar pemerintah yang bersifat global dan memiliki tujuan yang fungsional dan spesifik.

3. *Regional membership and general purpose*

Organisasi Internasional antar pemerintah yang anggotanya berasal dari satu regional, tujuan dari organisasi ini bersifat umum meliputi bidang politik, sosial, keamanan, ekonomi, dan sebagainya.

4. *Regional Membership and limited purpose*

Organisasi Internasional antar pemerintah yang keanggotaannya bersifat regional dengan tujuan yang khusus dan spesifik, Organisasi Internasional ini bergerak dalam bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dsb (Perwita&Yani, 2017: 94)

2.1.5 Regionalisme

Dalam ilmu hubungan internasional, regionalism menjadi unsur penting yang acap kali dibicarakan sejalan dengan perkembangan globalisasi yang membuat dunia terlihat lebih kecil dan tanpa batas serta memungkinkan terjadinya penyatuan dan pengelompokan wilayah dalam bidang ekonomi, sosial budaya juga pertahanan. Secara harfiah regionalisme berasal dari kata regional dan isme. Menurut hubungan internasional kata region berarti unit terkecil dari suatu Negara sedangkan regional adalah dua atau lebih Negara yang berdasarkan letak geografisnya berdekatan, secara sederhana regionalism adalah kumpulan Negara dalam satu wilayah yang sama-sama mencapai tujuan bersama. Joseph S. Jr Nye beranggapan bahwa regionalism merupakan wilayah dalam satu region yang dikoneksikan berdasarkan kondisi geografis dan ketergantungan bersama.

Merujuk pada opini tersebut, Nye mengatakan bahwa regionalism merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region (Perwita&Yani, 2017:103).

Louis Cantori dan Stevel Spiegel mengungkapkan teorinya mengenai konsep region.

“Kawasan ialah dua Negara atau lebih yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, budaya, bahasa, keterkaitan histori, sosial dan perasaan identitas yang meningkat karena perilaku Negara diluar kawasan. Kedua teoritis ini membagi *subordinate system* ke dalam tiga bagian: *core sector* (Negara inti kawasan), *peripheral sector* (Negara pinggiran kawasan) dan *intrusive system* (Negara eksternal kawasan yang berpartisipasi dalam interaksi kawasan) (Perwita&Yani, 2017:104).

Menurut Andrew Hurrell terdapat 5 proses dalam regionalism, yaitu:

1. Regionalisasi

Perkembangan interaksi dalam kawasan yang secara tidak langsung berfokus pada bidang sosial dan ekonomi, proses ini terjadi secara alami ketika Negara saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dalam proses ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan (1) regionalisme tidak dilakukan secara sadar oleh Negara atau kelompok manapun (2) pola regionalism tidak harus terbatas pada batas Negara.

2. Kesadaran dan identitas regional

Merupakan persepsi bersama yang dimiliki oleh komunitas khusus yang proses penekanan regionalnya berdasarkan pada: (1) bahasa dan retorika (2) wacana tentang regionalism dan identitas nasional yang terus

didefinisikan (3) pemahaman umum dari para aktor yang terlibat mengenai kegiatan politiknya.

3. Kerjasama antar Negara dalam kawasan

Merupakan kerjasama antar Negara dengan tujuan tertentu untuk memelihara kesejahteraan, nilai-nilai bersama serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul atas dasar interdependensi. Kerjasama kawasan dapat berskala luas, pada satu sisi kerjasama ini dapat dilakukan untuk merespon kondisi eksternal dan disisi lain kerjasama ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

4. Integrasi nasional yang didukung Negara

Mengacu pada integrasi ekonomi sebuah kawasan yang pemerintahnya membuat kebijakan untuk mempermudah dan menghilangkan hambatan terhadap barang, jasa dan tenaga kerja.

5. Kohesi regional

Perpaduan antara 4 proses diatas yang bergabung menciptakan kohesi dan konsolidasi suatu unit region. Kohesi memerankan dua peran, yaitu ketika kawasan memerankan pengaruh terhadap kawasannya atau kawasann lain yang memainkan peran dan ketika satu kawasan membentuk peraturan untuk suatu isu tertentu (Nuraeni, 2010:6-12).

Perubahan yang berlangsung cepat dalam hubungan internasional telah memunculkan istilah regionalism baru dan regionalisme lama, yang dapat dibedakan dalam beberapa kategori:

1. Regionalisme lama terbentuk berdasarkan peninggalan perang dingin dimana fokusnya terhadap bidang keamanan dan ideologi sedangkan regionalisme baru terbentuk berdasarkan struktur interaksi yang bersifat multipolar.
2. Regionalisme lama kerap kali dibentuk oleh intervensi Negara-negara adikuasa sedangkan regionalism baru terbentuk atas dasar dorongan dari internal Negara itu sendiri, hal ini dikarenakan Negara butuh untuk bekerjasama demi menghadapi isu-isu global.
3. Regionalisme lama lebih berorientasi kedalam (*inward looking*) dan bersifat proteksionis. Sedangkan regionalism baru lebih bersifat terbuka (*open regionalism*) dan menyesuaikan terhadap ekonomi dunia yang semakin interdependen.
4. Dilihat dari lingkungan kegiatannya, regionalisme lama lebih bersifat spesifik pada fokus kegiatan, contohnya NATO yang memfokuskan kegiatan dalam bidang militer di Eropa, sedangkan regionalism baru lebih bersifat komperhensif dan multidimensional (Perwita&Yani, 2017: 105-106).

2.2 Kerangka Pemikiran

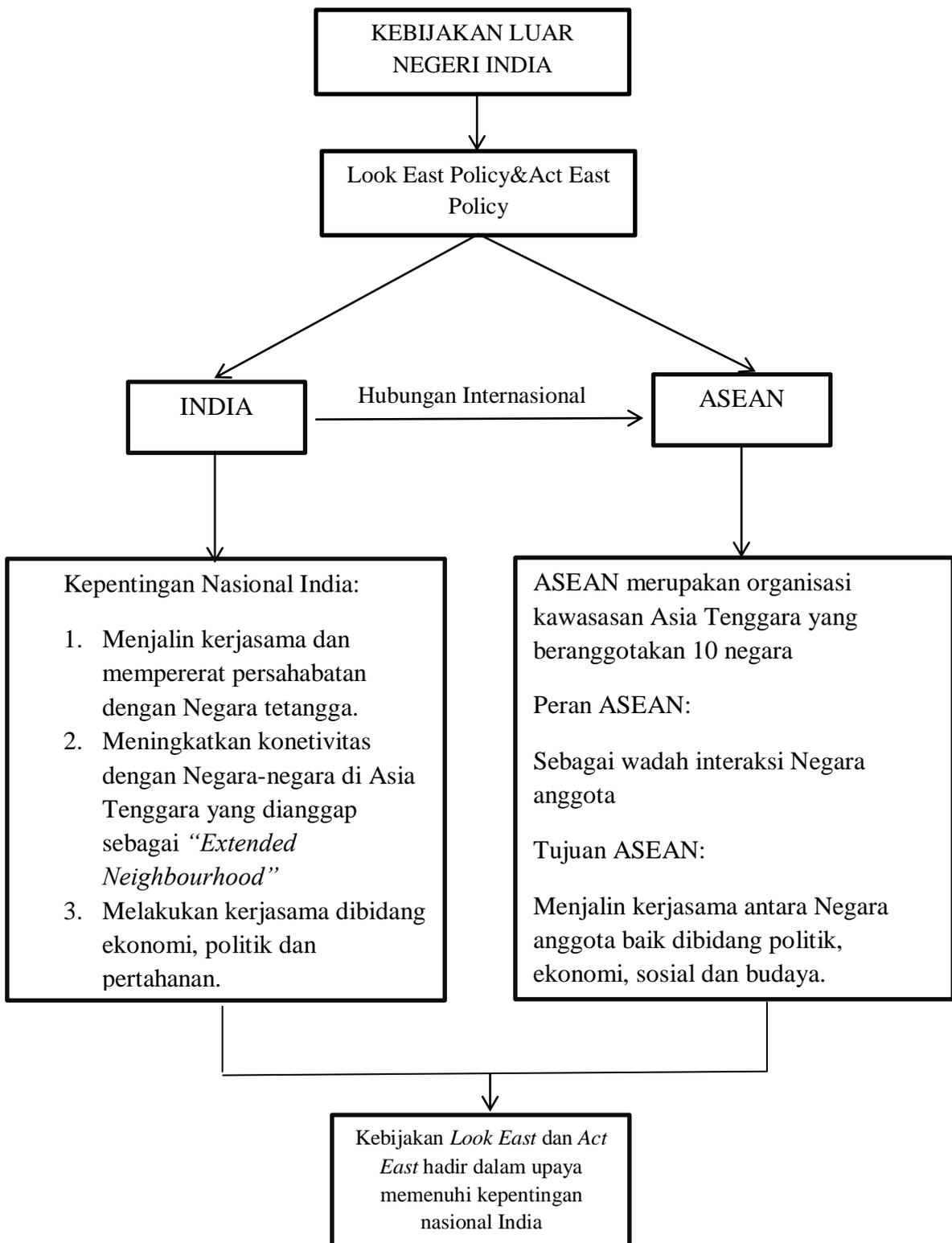
Setiap Negara membutuhkan interaksi dengan Negara lain demi mencapai kepentingan nasionalnya karena tidak ada Negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maka dilakukan kerjasama. Berbagai macam kebijakan luar negeri diberlakukan oleh masing-masing Negara tak lain untuk kepentingan Negara masing-masing. Tak hanya kerjasama antar dua Negara namun juga

kerjasama antar Negara dengan region tertentu. Seperti yang dilakukan oleh India-ASEAN, dalam naungan formasi kebijakan luar negerinya, India terus bekerjasama dengan ASEAN. Empat rezim saling berganti namun kerjasama India-ASEAN tetap berjalan dan terus berkembang.

Kebijakan *Look East* yang dicetuskan oleh pemerintah India lahir pada masa pemerintahan Narishma Rao, yang kemudian oleh perdana menteri terpilih, Narendra Modi diubah menjadi kebijakan *Act East*. Dengan adanya kerjasama ini membuka peluang untuk India maupun ASEAN dalam lingkup geopolitik dan geostrategic di kawasan Asia Tenggara mengingat India menjadi mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. Kerjasama kedua kawasan ini merupakan kerjasama yang sangat potensial bila dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah dan letak strategis kedua wilayah.

Dengan pendekatan India terhadap ASEAN dalam konteks kebijakan *Look East* dan *Act East* telah dilakukan kerjasama dalam politik, ekonomi serta keamanan, tak hanya itu berkat diformulasikannya kebijakan tersebut India menjadi salah satu mitra wicara penuh ASEAN sejak 1992 tepat satu tahun sejak diberlakukannya kebijakan *Look East*.

Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan melalui bagan tersebut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

